BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hubungan transatlantik merujuk pada relasi antara Kawasan Amerika Serikat (AS) dengan Benua Eropa. Relasi yang secara geografis dihubungkan oleh Samudra Atlantik ini telah terbentuk dan menguat sejak periode pasca-Perang Dunia II.[1] Inti dari keberlanjutan hubungan transatlantik terletak pada kesamaan nilai-nilai, ikatan sejarah, dan tujuan bersama. Dalam disiplin Hubungan Internasional, kemitraan ini diakui sebagai akar institusional dan fondasi Tatanan Internasional Barat *(Western International Order).*[2] Yang berarti, kolaborasi transatlantik telah menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi erat, mencakup sektor seperti keamanan, ekonomi, politik, dan sosial, yang berfungsi sebagai pilar stabilitas dalam pembangunan global.

Dinamika sejarah hubungan transatlantik bermula ketika pasca Perang dunia II, pada saat itu kondisi benua Eropa mengalami kehancuran yang sangat mendalam. Sebanyak 36,5 juta warga sipil tewas selama perang dan menyebabkan banyak infrastruktur hancur dan terbengkalai[3]. Melihat kehancuran yang signifikan, pada tahun 1947, AS menginisiasi untuk memberikan bantuan ekonomi secara besar besaran kepada Eropa yang dikemas dalam sebuah program bernama

[1] Daniel S. Hamilton dan Joseph P. Quinlan, *The Transatlantic Economy 2024: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe* (Washington, DC: Foreign Policy Institute, Johns Hopkins University SAIS, 2024)
[2] Marianne Riddervold, *EUROPEAN POLICY ANALYSIS Changing Transatlantic Relations-and What It Means for Europe* (2023), www.sieps.se.
[3] "NATO - Declassified: A Short History of NATO," Diakses pada tanggal 28 September, 2025, https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm.

"Marshall Plan". Bantuan ini telah menjadi dasar yang kuat terbentuknya hubungan antara AS dan Eropa. Setelah perang dunia II berakhir, munculnya ancaman baru dari Uni Soviet dengan ideologi komunis nya telah menciptakan ketakutan bagi Eropa dan AS. Oleh karena itu, dalam rangka membendung kekuatan Soviet di wilayah Barat Eropa, AS memprakarsai pembentukan sebuah organisasi pertahanan yang menjamin keamanan Eropa. Organisasi itu bernama North Atlantic Treaty Organization yang ditandatangani pada 9 April 1949 di Washington DC, Amerika Serikat.[4]

Semenjak masa awal pembentukan NATO, pembagian beban dan kontribusi anggota tidak pernah ditetapkan secara spesifik, seperti berapa jumlah anggaran pertahanan yang harus dikeluarkan oleh satu negara atau berapa acuan komitmen yang harus dipenuhi oleh masing masing negara dalam jangka waktu tertentu. Sebagian besar pengeluaran pertahanan NATO dari awal pembentukannya sampai setelah perang dingin berakhir ditanggung oleh AS. Bentuk pengeluaran pertahanan yang diberikan oleh AS adalah *nuclear umbrella* atau payung nuklir yang merupakan penjamin keamanan dengan peletakan bahan peledak dan persenjataan di wilayah Eropa oleh AS untuk menangkal dan bersiap dari ancaman Uni Soviet[5].

Hingga pada tahun 2014, AS masih menjadi kontributor utama di dalam aliansi NATO dengan menyumbang sebanyak 3,4% dari GDP nya untuk pertahanan

[4] Adi Rio Arianto, *Rivalitas Prancis-Amerika Serikat Di NATO Dan Implikasinya Terhadap Agenda Keamanan Global Pasca Integrasi Prancis Di Struktur Militer NATO* (n.d.), www.ambafrance-ca.org.
[5] Tytti Erästö, *The Role of Umbrella States in the Global Nuclear Order,* SIPRI Insights on Peace and Security No. 2023/06 (Solna: Stockholm International Peace Research Institute, 2023)

NATO, sementara negara negara Eropa hanya memberikan kurang dari 2% GDP nya untuk pertahanan NATO dan bahkan memangkas secara besar besaran anggaran pertahanannya[6]. Kondisi ini menyebabkan munculnya sebuah permasalahan internal di dalam NATO, yaitu pembagian beban yang tidak seimbang yang menyebabkan keretakan hubungan transatlantik kedepannya[7].

Sebagai negara yang terus berkomitmen terhadap NATO, mulai dari pembentukannya sampai pada masa sekarang ini, AS melihat bahwa permasalahan ini adalah sebagai sebuah isu yang apabila dibiarkan, akan menciptakan ketergantungan jangka panjang dan kerugian bagi negaranya sendiri maupun bagi aliansi. Pada masa pemerintahan Donald Trump, isu ini cukup banyak mendapat perhatian dari pemerintahan AS. Pada masa presidensi nya yang pertama, reaksi yang ditunjukkan oleh Donald Trump masih berupa dorongan untuk aliansi agar membayar komitmen pertahanan sebanyak 2% dari GDP masing masing negara. Dorongan ini berubah menjadi sebuah desakan atau instrument kebijakan luar negeri AS ketika Trump kembali menduduki jabatan presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2025. Trump mendesak agar negara negara aliansi harus segera meningkatkan komitmen investasi pertahanan nya menjadi 5% yang semula hanya 2% dari GDP[8]. Desakan ini disertai dengan ancaman dan disampaikan beberapa

[6] Jan Techau, *The Politics of 2 Percent: NATO and the Security Vacuum in Europe* (Brussels: Carnegie Europe, 2015)
[7] Florian Dorn, *Defense Spending for Europe's Security-How Much Is Enough?* (n.d.), https://www.intereconomics.eu/contents/year/2024/number/4/article/ensuring-european-security-and-stability.html.
[8] David Vergun, "NATO Leaders Pledge to Increase Defense Spending," U.S. Department of War, 25 Juni 2025, https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/4226009/nato-leaders-pledge-to-increase-defense-spending/.

kali di dalam pertemuan resmi terbuka seperti dalam World Economic Forum di Davos tahun 2025.

Hingga pada Juni 2025, KTT NATO dilaksanakan di Den Haag, Belanda sebagai respons dari desakan dan tekanan AS terhadap aliansi yang hasilnya menyepakati bahwa komitmen investasi pertahanan atau anggaran perbelanjaan terhadap penguatan keamanan resmi dinaikkan menjadi 5% dari PDB masing masing negara anggota.[9] Keputusan ini menimbulkan multitafsir dan reaksi berbeda dari Negara anggota, khususnya Negara Negara Eropa. Walaupun Keputusan ini pada akhirnya tetap disepakati, tetapi proses dibaliknya memiliki dinamika yang cukup banyak, terutama berasal dari sisi AS.[10] AS adalah pemicu utama dibalik Keputusan ini, karena kebijakannya yang terus mendesak aliansi agar menaikkan komitmen investasi pertahanan yang dianggap gagal memenuhi komitmen investasi sebelumnya[11].

Fenomena ini menarik diteliti karena melihat sebuah pola baru yang muncul dari hubungan Amerika Serikat dan Eropa yang telah berjalan lama. Perubahan hubungan yang disebabkan oleh Kebijakan AS yang mendesak dan cenderung mengancam aliansi Eropa nya dalam bekerja sama dan bersikap kepada aliansi tidak lagi mempertimbangkan Sejarah, nilai dan norma yang dibangun secara bersama

[9] By The Rt Hon Rafael Hernández de Santiago, *Results of the NATO Summit 2025 at The Hague: Unity, Threats, and Strategic Realignment* (n.d.), www.grc.net.
[10] Sara Arias Saiz, "Redefining Security: Spain's Answer to NATO's 5% Imperative," EuropeanRelations.com, 25 Agustus 2025, https://europeanrelations.com/redefining-security-spains-answer-to-natos-5-imperative/.
[11] The White House, "President Trump's Leadership, Vision Drives NATO Breakthrough," 26 Juni 2025, https://www.whitehouse.gov/articles/2025/06/president-trumps-leadership-vision-drives-nato-breakthrough/.

tetapi sebagai bentuk hubungan bisnis dengan *partner* yang disetiap tindakan memiliki harga yang harus dibayar.

1.2. Rumusan Masalah

Kebijakan Amerika Serikat pada tahun 2025 yang mendesak dan menuntut aliansi nya sendiri di dalam NATO telah menuai kontroversi dan reaksi yang berbeda dari para pemimpin Eropa. Kebijakan ini dianggap oleh AS sebagai Upaya untuk menciptakan keadilan dalam pembagian beban aliansi, sementara Eropa yang selama ini keamanan wilayah nya dijamin oleh AS merasakan adanya perubahan arah kebijakan luar negeri AS, yang kini mulai menjauh dan menuntut aliansi terdekat nya. Kebijakan AS dalam mendesak NATO dipersepsikan sebagai pemicu keretakan hubungaan transatlantic yang sudah berjalan dari lama. Menarik untuk diteliti mengapa AS mengeluarkan kebijakan nya yang kontroversi sehingga menimbulkan kontra dari para pemimpin di Eropa

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah, dapat ditarik pertanyaan penelitian "Mengapa Amerika Serikat mendesak NATO untuk menaikkan komitmen investasi pertahanan aliansi?"

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis kebijakan Amerika Serikat dalam mendesak NATO untuk menaikkan komitmen invetasi pertahanan yang dipersepsikan sebagai pemicu pergeseran hubungan keamanan transatlantik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.5.1. Akademik

Dalam ranah akademik penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap aliansi nya, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai evolusi hubungan AS-Eropa, melampaui narasi kemitraan yang konstan dan menyoroti fase fase ketegangan dan penyesuaian.

1.5.2. Praktis

Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan diskusi bagi para pemangku kepentingan di dalam bidang analisis kebijakan luar negeri dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai kajian transatlantik.

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi atau bahan bacaan dari penelitian terdahulu, guna untuk membantu mendukung pengembangan studi ini dan melihat celah yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Referensi pertama yang digunakan adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Jane E. Stromseth yang berjudul *The North Atlantic Treaty and European Security after the Cold War*. Dalam studinya, Stromseth berupaya menganalisis relevansi dan peran NATO yang berkelanjutan di tengah pembubaran Pakta

Warsawa dan reunifikasi Jerman, yang telah mengubah lingkungan keamanan Eropa.[12] Penulis berargumen bahwa ancaman utama telah bergeser dari agresi militer terencana menjadi potensi ketidakstabilan internal, konflik etnis, dan tekanan separatis di Eropa Timur. Stromseth menyimpulkan bahwa meskipun peran militer NATO akan berkurang, NATO harus bertransformasi menjadi "jangkar stabilitas" (*anchor of stability*) dan penghubung keamanan transatlantik. Penulis secara eksplisit menyarankan NATO untuk menerima peran yang lebih kecil, yaitu "siaga" sebagai pagar pengaman terhadap pola konflik lama, tanpa mencari peran baru yang besar sebagai "pemecah masalah" di luar wilayah. Penelitian ini sangat relevan sebagai landasan historis karena menetapkan titik awal perdebatan mengenai masa depan NATO dan mengidentifikasi isu-isu fundamental (peran politik dan militer, lingkup geografis, dan hubungan institusional) yang hingga kini masih menjadi tantangan utama Aliansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah terletak pada relevansi tahun. publikasi tahun 1991 tersebut hanya merefleksikan proyeksi awal transisi di tengah optimisme pasca-Perang Dingin, sehingga belum dapat memasukkan ancaman terstruktur yang muncul di periode selanjutnya, seperti terorisme transnasional pasca-9/11, tantangan siber, atau kebangkitan agresi negara seperti yang dialami NATO pasca-aneksasi Krimea tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi *gap* tersebut dengan menganalisis apakah NATO benar-benar dapat mempertahankan peran sebagai "jangkar stabilitas" atau justru dipaksa

[12] Jane E Stromseth, "The North Atlantic Treaty and European Security after the Cold War," in *Cornell International Law Journal*, vol. 24 (1991), http://scholarship.law.cornell.edu/ciljhttp://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol24/iss3/6.

mengambil peran yang lebih besar sebagai respons terhadap ancaman spesifik yang terjadi setelah tahun 1991.

Referensi kedua yang digunakan adalah penelitian Joyce P. Kaufman (2017), *The US perspective on NATO under Trump: lessons of the past and prospects for the future*, yang merupakan analisis kebijakan mengenai prospek dan tantangan bagi Aliansi NATO di tengah retorika anti-aliansi dari Presiden Donald Trump[13]. Peneliti menemukan bahwa Kaufman secara spesifik menggunakan perspektif historis untuk meninjau kembali dinamika yang melandasi hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Eropa, yang pada akhirnya menentukan komitmen Washington terhadap NATO. berargumen bahwa pernyataan Trump yang menyebut NATO "usang" (*obsolete*) bukanlah penyimpangan sejarah, melainkan manifestasi terbaru dari pola historis konflik dan ketidakpercayaan yang telah melandasi hubungan transatlantik sejak era Perang Dingin, khususnya sejak masa Presiden Nixon yang menyerukan *burden-sharing* yang lebih adil. Bagi Kaufman, ketegangan selalu berpusat pada dilema AS dalam menyeimbangkan kepemimpinan globalnya dengan kepentingan domestik dan strategi *realpolitik* yang terkadang mengorbankan perasaan sekutu Eropa. Isu kepemimpinan dan pembagian beban (*burden-sharing*) menjadi penekanan, di mana Aliansi hanya akan bertahan jika AS menegaskan kembali perannya sebagai pemimpin, dan Eropa harus beradaptasi dengan realitas politik AS yang berubah. Oleh karena itu, penelitian Kaufman sangat relevan dan mendasar bagi penelitian ini karena Mengkontekstualisasikan secara spesifik bagaimana awal hubungan politik NATO

[13] Joyce P. Kaufman, "The US Perspective on NATO under Trump: Lessons of the Past and Prospects for the Future," *International Affairs* 93, no. 2 (Maret 2017)

dan AS terbentuk, serta dinamika nya setelah perang dingin. Selain itu tulisan ini juga akan memberikan diagnosis mendalam tentang dampak ketidakpastian politik domestik AS terhadap kohesi Aliansi, yang sangat penting untuk memahami mengapa target 2% PDB menjadi sangat politis.

Terdapat perbedaan signifikan atau *gap* yang harus diisi oleh penelitian peneliti. Tulisan Kaufman dipublikasikan pada awal tahun 2017, di mana retorika Trump baru saja dimulai dan dampak aktual kebijakan serta kemampuan Aliansi untuk beradaptasi masih bersifat spekulatif. Analisis Kaufman sebagian besar merupakan evaluasi prediktif yang merefleksikan kecemasan awal di AS dan Eropa. Penelitian peneliti akan mengisi *gap* tersebut dengan menganalisis konsekuensi jangka panjang dan implementasi aktual dari tuntutan Trump. Secara khusus, peneliti akan mengevaluasi sejauh mana polarisasi yang didiagnosis oleh Kaufman telah berevolusi pasca-2020. peneliti akan fokus pada bagaimana peristiwa penting pasca-2017 terutama invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022 dan KTT NATO 2025 telah mengubah *perspektif AS* itu sendiri dan apakah krisis tersebut berhasil menanggulangi atau justru memperparah dilema kepemimpinan AS yang dianalisis oleh Kaufman.

Referensi ketiga yang digunakan adalah tulisan Marianne Riddervold (2024), *Changing transatlantic relations and what it means for Europe*, yang diterbitkan dalam *European Policy Analysis* oleh SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies), menyajikan perspektif yang paling mutakhir dan mengenai kondisi hubungan transatlantik saat ini.[14] Penelitian ini secara lugas

[14] Marianne Riddervold, *EUROPEAN POLICY ANALYSIS Changing Transatlantic Relations-and What It Means for Europe* (2023), www.sieps.se.

menyatakan bahwa meskipun hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Eropa tetap menjadi hubungan interregional terkuat di dunia berkat jaringan, perdagangan, dan saling ketergantungan yang luas. Hubungan ini berada di persimpangan jalan dan berpotensi melemah secara serius. Peneliti menemukan bahwa pelemahan ini didorong oleh dua faktor utama: perubahan struktural geopolitik di mana AS memprioritaskan Tiongkok di atas Eropa, serta perubahan domestik di AS, terutama meningkatnya polarisasi politik yang membuat dukungan AS terhadap keamanan Eropa menjadi kurang pasti. Pentingnya kerjasama transatlantik digarisbawahi oleh invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, yang tidak hanya mengembalikan isu keamanan teritorial ke garis depan agenda Eropa, tetapi juga secara tajam memperlihatkan kerentanan dan ketergantungan mendalam Eropa pada sumber daya AS untuk pertahanan dan dukungan terhadap Ukraina. Oleh karena itu, penelitian Riddervold ini sangat relevan karena menganalisis tantangan spesifik yang dihadapi Eropa dalam menghadapi prospek kepresidenan AS yang lebih isolasionis dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan Eropa untuk memperkuat pertahanannya sendiri di dalam NATO dan Uni Eropa, sambil berupaya menjaga AS tetap sedekat mungkin.

Meskipun penelitian Riddervold memberikan diagnosis yang paling relevan secara waktu, tetapi masih adanya gap yang dapat diisi oleh penelitian ini. Sebagai analisis kebijakan yang sangat kontemporer, fokus utama Riddervold adalah pada diagnosis kondisi hubungan transatlantik yang melemah dan penentuan langkah-langkah strategis yang harus diambil Eropa: meningkatkan dukungan terhadap Ukraina dan memperkuat keamanannya sendiri. Dengan demikian, Riddervold menyajikan kerangka kerja normatif dan prediktif mengenai masa depan Aliansi, di

mana keamanan Eropa menjadi lebih bergantung pada kemampuannya sendiri dan pada peningkatan komitmen belanja pertahanan. Sementara itu, penelitian yang sedang diteliti diambil menggunakan sudut pandang dari Amerika Serikat, bukan dari sudut pandang Eropa. Sudut pandang yang dilihat dari analisis rasional amerika yang menggunakan kebijakan nya dalam bentuk desakan kepada sekutu Eropa nya dan hal ini memicu pergeseran hubungan. Spesifiknya penelitian yang sedang diteliti melihat dari aspek pergeseran di bidang keamanan, NATO dengan menggunakan studi kasus kenaikan anggaran perbelanjaan NATO menjadi 5% pada bulan Juni 2025. Sehingga penelitian ini akan mengisi kekurangan penelitian sebelumnya dengan menambahkan dimensi baru.

Referensi keempat yang digunakan adalah tulisan karya Juan C. Castilla (2025) yang berjudul *NATO between Washington and The Hague: Identity and Discourse Crisis,* yang memaparkan analisis mengenai perubahan dalam tubuh NATO selama periode transisi antara KTT Washington 2024 dan KTT Den Haag 2025. Castilla menyoroti bahwa aliansi ini sedang mengalami krisis identitas dan kohesi yang dipicu oleh kepemimpinan Amerika Serikat yang cenderung bersifat transaksional dan isolasionis dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump[15]. Castilla menjelaskan bahwa diskursus NATO telah menyempit dari sebuah *value based-community* yang menjunjung tinggi komitmen kolektif menjadi bentuk kerja sama yang sangat bernilai. Hal ini tercermin jelas dalam perbandingan komunike kedua KTT tersebut, di mana pada KTT Den Haag 2025, narasi politik NATO direduksi menjadi dokumen formal yang hanya berfokus pada target investasi

[15] Juan C. Castilla, "NATO between Washington and The Hague: Identity and Discourse Crisis," *Analysis Paper* 57/2025, Instituto Español de Estudios Estratégicos (17 September 2025), https://www.ieee.es.

pertahanan yang ambisius sebesar 5% dari PDB. Artikel ini menekankan bahwa tekanan Amerika Serikat mengenai pembagian beban atau *burden-sharing* telah menciptakan terpecahnya agenda keamanan antara Washington dan Eropa, di mana investasi pertahanan tidak lagi dipandang sebagai kontribusi sukarela untuk keamanan bersama, melainkan sebagai syarat transaksional untuk mempertahankan payung perlindungan yang diberikan oleh AS.

Meskipun artikel Castilla telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai krisis diskursus dan identitas NATO, terdapat celah penelitian yang akan diisi oleh penelitian ini. Castilla lebih banyak menitikberatkan pembahasannya pada dampak krisis tersebut terhadap stabilitas institusional NATO dan risiko hibernasi aliansi dari perspektif keamanan Eropa. Sebaliknya, penelitian ini akan berfokus secara spesifik dalam menganalisis tujuan AS mengeluarkan kebijakan desakannya tersebut. Jika Castilla melihat target 5% sebagai hasil dari krisis identitas, penelitian ini akan membedah aspek atau sisi lain diluar faktor identitas. Oleh karena itu, tulisan Castilla ini akan menjadi salah satu referensi utama bagi peneliti dalam mendapatkan perspektif mengapa AS mengeluarkan kebijakan tersebut. Kemudian peneliti akan menghubungkan perspektif tersebut dengan temuan lainnya yang akan didapatkan selama masa penelitian.

Referensi kelima yang digunakan adalah tinjauan dari Benjamin Zyla (2016) berjudul *NATO Burden Sharing: A New Research Agenda*. Penelitian ini secara metodologis memetakan dominasi teori rasionalis dalam studi pembagian beban Atlantik. Zyla menegaskan bahwa sebagian besar literatur konvensional mengenai *burdensharing* didominasi oleh model dan teori rasionalis, yang

didasarkan pada penalaran deduktif dan individualisme metodologis, serta berasumsi bahwa negara adalah aktor yang memaksimalkan utilitas (*utility-maximizing state*).[16] Dalam kerangka ini, pembagian beban dipandang sebagai *public goods* di mana negara yang paling mampu (AS) diharapkan menjadi penyedia utama keamanan, sementara negara-negara yang kurang mampu (sekutu Eropa) termotivasi untuk melakukan *free-riding* (memanfaatkan keamanan tanpa membayar secara proporsional). Penelitian Zyla ini menjadi fondasi teoretis yang kuat bagi peneliti untuk menganalisis keputusan AS khususnya terkait kritik 2% oleh Paul Belkin sebagai pilihan yang rasional dalam upaya memaksimalkan nilai atau meminimalkan biaya keamanan kolektif. Konsep *free-riding* yang diturunkan dari teori ini secara langsung memberikan justifikasi akademis terhadap kritik AS kepada sekutu Eropa yang menjadi inti perdebatan dalam referensi 2, 3, dan 4.

Berdasarkan tulisan Zyla, peneliti mengidentifikasi adanya gap metodologis yang akan diatasi oleh studi ini. Fokus utama Zyla adalah pada kritik terhadap pendekatan rasionalis yang menganggap *burdensharing* hanya sebagai hasil (*outcome*) daripada praktik (*practice*) yang dibentuk oleh pengetahuan politik, negosiasi, dan identitas sosial. Zyla menyerukan agar agenda penelitian masa depan beralih ke variabel kualitatif dan interpretatif (sosiologis) untuk memahami bagaimana negara-negara mengonstruksi dan mempersepsikan beban aliansi. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan peneliti ini akan beroperasi di antara kedua pandangan tersebut: menggunakan Analisis Kebijakan Luar Negeri sebagai lensa untuk memahami *motivasi* AS yang berbasis *cost-benefit*, tetapi kemudian menguji

[16] Benjamin Zyla, "NATO Burden Sharing: A New Research Agenda," in *JIOS*, vol. 7 (2016), www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49198.htm,.

data empiris aktual (terkait pemenuhan 2% pasca-2015/2022) untuk mengukur apakah hasil (*outcome*) yang didorong oleh *pressure* AS *rasional* tersebut benar-benar berhasil mengubah perilaku *burdensharing* sekutu. Dengan demikian, penelitian ini akan menguji batasan dari model rasionalis dalam menjelaskan dinamika pembagian beban NATO di tengah perubahan structural

1.7. Kerangka Konseptual

Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, maka dibutuhkannya sebuah kerangka konseptual untuk menganalisis isi penelitian. Kerangka konseptual yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah *Foreign Policy Analysis* atau FPA. Berangkat dari defenisi *Foreign Policy* atau kebijakan luar negeri menurut Morin dan Paquin, adalah serangkaian tindakan dan pernyataan pemerintah nasional dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk memengaruhi aktor lain dan mencapai tujuan nasionalnya.[17] Dalam memahami kebijakan luar negeri suatu negara, *Foreign Policy Analysis* (FPA) memberikan perangkat konseptual yang memungkinkan peneliti untuk mengurai elemen-elemen yang membentuk kebijakan tersebut. Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin dalam bukunya *Foreign Policy Analysis: A Toolbox (2018)* menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bukanlah satu tindakan tunggal, melainkan suatu fenomena kompleks yang terdiri atas serangkaian komponen yang dapat diidentifikasi dan dianalisis.[18]

Morin dan Paquin memperkenalkan lima indikator utama dalam menganalisis kebijakan luar negeri melalui bukunya pada *Chapter 2: How to*

[17] Jean-Frédéric Morin and Jonathan Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX* (n.d.).
[18] Morin and Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX*.

Identify Foreign Policy?, yaitu: *the goals of foreign policy, mobilized resources, instruments, process,* dan *outcomes of foreign policy*. Kelima indikator tersebut merupakan seperangkat alat analitis (*toolbox*) yang terpadu dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan luar negeri.

1.7.1. The Goals of Foreign Policy

Indikator pertama dalam kerangka Morin dan Paquin berfokus pada tujuan kebijakan luar negeri yakni apa yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui tindakannya di luar negeri. Tujuan kebijakan luar negeri mencerminkan kepentingan nasional sebagaimana ditafsirkan oleh para pembuat kebijakan, baik dalam bentuk pernyataan eksplisit (deklaratif) maupun dalam tindakan konkret yang diambil negara.

Morin dan Paquin menjelaskan bahwa analisis terhadap tujuan kebijakan luar negeri memiliki dua lapisan penting, pertama, tujuan deklaratif (*declared goals*), yaitu yang dinyatakan secara terbuka melalui dokumen resmi, pidato, atau pernyataan diplomatik dan kedua, tujuan aktual (*actual goals*), yaitu kepentingan yang secara implisit memotivasi perilaku negara di luar pernyataan publiknya.[19] Dengan menganalisis kedua lapisan ini, peneliti dapat membedakan antara retorika politik dengan kalkulasi strategis yang sebenarnya melandasi kebijakan luar negeri.

Morin dan Paquin membagi dimensi ini ke dalam beberapa bentuk atau manifestasi tujuan, yaitu:

[19] Morin and Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX*.

a. Communicated Goals

Communicated goals merupakan tujuan yang dinyatakan secara eksplisit oleh para pembuat kebijakan dalam bentuk dokumen resmi, pernyataan diplomatik, atau pidato kenegaraan. Tujuan yang dikomunikasikan secara terbuka sering kali berfungsi sebagai sinyal politik untuk mengkomunikasikan nilai, prioritas, dan aspirasi negara kepada audiens domestik maupun internasional. Analisis terhadap *communicated goals* digunakan untuk mengidentifikasi pesan yang ingin disampaikan pemerintah dan bagaimana pesan tersebut digunakan untuk membentuk persepsi internasional terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut.[20]

Namun, Morin dan Paquin menekankan bahwa *communicated goals* tidak selalu mencerminkan *actual goals* (tujuan aktual) yang sesungguhnya mendasari tindakan luar negeri. Oleh karena itu, penelitian kebijakan luar negeri perlu membedakan antara deklarasi publik dan motivasi substantif yang tersembunyi di baliknya.[21]

b. Doctrines

Selain tujuan yang dikomunikasikan secara eksplisit, negara sering kali mengartikulasikan doktrin kebijakan luar negeri *(foreign policy doctrines*) yang berfungsi sebagai kerangka normatif dan strategis bagi tindakannya di dunia internasional. *Doctrines* merupakan prinsip atau pedoman jangka panjang yang menuntun pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas, memilih alat kebijakan, dan menafsirkan kepentingan nasional.

[20] Morin and Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX*.
[21] Morin and Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX*.

Dalam analisis kebijakan luar negeri, doktrin berfungsi sebagai acuan konseptual untuk memahami pola konsistensi kebijakan lintas waktu, serta untuk menafsirkan logika di balik tindakan yang diambil dalam berbagai konteks situasional.

c. National Interests

National interests merupakan konsep yang menggambarkan tujuan substantif dan rasional dari kebijakan luar negeri suatu negara. Morin dan Paquin menegaskan bahwa kepentingan nasional adalah konstruksi sosial dan politik yang dibentuk melalui proses interpretasi oleh elite pengambil ke bijakan. Dengan kata lain, kepentingan nasional merupakan hasil dari interaksi antara faktor domestik, nilai-nilai ideologis, serta persepsi terhadap ancaman dan peluang di lingkungan internasional. Analisis terhadap *national interests* memungkinkan peneliti untuk memahami prioritas strategis yang menjadi dasar tindakan luar negeri negara tertentu.

Semua elemen diatas nantinya akan dideduksi atau digabungkan untuk dianalisis dan menciptakan sebuah Kesimpulan.

1.7.2. The Mobilized Resources

Dimensi kedua dalam *Foreign Policy Analysis* menurut Morin dan Paquin adalah mobilized resources, yang merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dalam kerangka ini, Morin dan Paquin menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan luar bergantung pada kapasitas negara dalam menggerakkan sumber daya yang relevan secara strategis dan efisien.

Mereka membagi pembahasan tentang sumber daya ini ke dalam tiga elemen utama, yaitu *resources*, *the power paradox*, serta *mobilization and exploitation*.

Pertama, *resources* mencakup seluruh bentuk aset nasional yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri, baik yang bersifat material maupun non-material. Sumber daya material dapat berupa kekuatan militer, kemampuan ekonomi, cadangan energi, serta kapasitas teknologi, sementara sumber daya non-material mencakup reputasi internasional, kredibilitas diplomatik, nilai-nilai ideologis, dan kapasitas normatif suatu negara dalam memengaruhi perilaku aktor lain.

Kedua, Morin dan Paquin memperkenalkan elemen *the power paradox*, yakni paradoks antara kesenjangan kekuatan dan efektivitas kebijakan. Negara yang memiliki sumber daya besar tidak selalu lebih efektif dalam mencapai tujuan politik luar negerinya dibanding negara yang memiliki sumber daya terbatas. Contohnya adalah Amerika Serikat pasca Perang Dunia I yang sudah memiliki sumber daya ekonomi untuk mengatur sistem ekonomi internasional sesuai kepentingannya namun malah lebih memilih kebijakan luar negeri yang isolasionis hingga Presiden Roosevelt menggunakan sumber daya ekonomi Amerika Serikat untuk meningkatkan pengaruhnya dalam sistem internasional pasca jatuhnya pasar saham 1929.

Ketiga, elemen *mobilization and exploitation* menjelaskan proses bagaimana negara menggerakkan (mobilize) dan dalam waktu bersamaan juga memanfaatkan (exploit) sumber daya yang ada secara simultan. Mobilisasi adalah transformasi dari sumber daya yang ada menjadi kemampuan atau kapabilitas dari

suatu negara. Sedangkan eksploitasi adalah transformasi kapabilitas tersebut menjadi instrumen kebijakan luar negeri. Proses-proses ini dijalankan oleh para pemangku kepentingan yang beroperasi dalam kerangka kerja institusional yang spesifik.

1.7.3. Instruments of Foreign Policy

Dimensi ketiga adalah instruments of foreign policy, yaitu alat dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Morin dan Paquin menjelaskan bahwa pemilihan instrumen kebijakan luar negeri sangat bergantung pada konteks politik, persepsi risiko, dan tujuan strategis yang ingin dicapai. Mereka membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi tiga kategori besar, yakni *socialization*, *coercion*, dan *intervention*, yang masing-masing mencerminkan tingkat keterlibatan dan tekanan yang berbeda dalam interaksi antarnegara.

Instrumen pertama, *socialization*, adalah proses transfer nilai dan norma melalui persuasi. Melalui mekanisme ini, negara berupaya memengaruhi perilaku aktor lain tanpa menggunakan paksaan, tetapi dengan cara membangun citra, mengkomunikasikan nilai, serta mendorong konvergensi kepentingan. Bentuk dari instrumen ini dapat berupa diplomasi publik, promosi nilai-nilai demokrasi, program bantuan pembangunan, pertukaran budaya, atau partisipasi dalam organisasi internasional yang bertujuan memperluas pengaruh melalui cara-cara kooperatif.

Instrumen kedua, *coercion*, mencakup berbagai bentuk tekanan yang bertujuan untuk memaksa negara lain agar menyesuaikan kebijakannya dengan

kepentingan negara pelaku. Instrumen ini dapat berupa sanksi ekonomi, embargo atau ancaman diplomatik lainnya. Meskipun bersifat koersif, instrumen ini sering kali dipilih sebagai upaya kompromi sebelum intervensi langsung, karena memungkinkan negara untuk menunjukkan kekuatan politiknya tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka.

Instrumen ketiga, *intervention*, merupakan bentuk keterlibatan paling intens dalam kebijakan luar negeri, di mana suatu negara secara langsung mencampuri urusan internal negara lain dan bertujuan untuk mengubah struktur tatanan dalam negeri, dan biasanya dilakukan dengan seperti mendanai kelompok separatis di negara tersebut. Morin dan Paquin menekankan bahwa penggunaan intervensi sering kali menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), sehingga pemilihan instrumen ini mencerminkan perhitungan politik yang sangat kompleks antara manfaat strategis dan risiko reputasional.

1.7.4. The Process of Foreign Policy

Dalam kajian analisis Kebijakan Luar Negeri, biasanya posisi eksekutif tertinggi akan ditentang, sementara itu posisi legislative akan jarang terlibat secara langsung. Proses kebijakan luar negeri merupakan interaksi kompleks antar individu, lembaga, dan politik domestik. Paquin dan Morin menguraikan proses kebijakan luar negeri ke dalam enam tahap yaitu, *framing, agenda-setting, option formulation, decision-making, implementation,* dan *evaluation*.

Pertama adalah *framing*, yaitu proses pembingkaian isu yang menentukan bagaimana suatu masalah dipersepsikan dan diprioritaskan dalam kebijakan luar negeri. Banyak masalah atau kebijakan yang tidak jelas karena tidak disusun

menggunakan kerangka atau framework khusus, oleh karena itu masalah harus terlebih dahulu diberi framework yang berarti memberi nama, menginterpretasikan dan menyederhanakan masalah tersebut

Tahap kedua, *agenda-setting*, dalam tahapan ini peran aktor non negara sangat dibutuhkan untuk meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa isu atau masalah yang muncul harus segerea diproritaskan penyelesainnya

Tahap ketiga, *option formulation*, adalah proses di mana berbagai alternatif kebijakan dikembangkan dan dipertimbangkan. Dalam tahap ini, lembaga pemerintah, penasihat kebijakan, dan komunitas epistemik berperan dalam menyusun opsi-opsi kebijakan berdasarkan informasi dan sumber daya yang tersedia.

Tahap keempat adalah *decision-making*, yakni momen di mana keputusan formal diambil. Tahap ini bisa berlangsung di tingkat kepala negara, menteri luar negeri, atau lembaga pemerintahan lain yang memiliki otoritas eksekutif. Pengambilan keputusan sering kali melibatkan kompromi antar lembaga dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan politik domestik dan pertimbangan strategis luar negeri. Setelah Keputusan dibuat, selanjutnya adalah proses implementasi yang mana pada tahapan ini akan melibatkan fungsi administrasi publik dalam proses interpretasi dan pengimplementasian. Namun dalam seiring berjalannya waktu implementasi, sering ditemui hambatan dan keterbatasan maka dari itu tahapan keenam Adalah evaluasi di mana kebijakan ini bisa dikaji kembali atau berlanjut sesuai situasi yang ada.

1.7.5. The Outcomes of Foreign Policy

Indikator kelima dalam kerangka Morin dan Paquin menyoroti hasil atau konsekuensi dari kebijakan luar negeri, baik yang diharapkan (*intended outcomes*) maupun yang tidak diantisipasi (*unintended outcomes*). Bagi Morin dan Paquin, analisis *outcomes* bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, serta memahami dampak struktural dan relasional dari kebijakan tersebut terhadap tatanan internasional.[22]

Mereka menekankan bahwa setiap kebijakan luar negeri pada akhirnya menghasilkan perubahan baik pada posisi negara itu sendiri maupun pada hubungan antarnegara di lingkungan eksternalnya. *outcomes* justru mencerminkan efek jangka panjang yang tidak selalu sejalan dengan tujuan awal pembuat kebijakan.[23] Dimensi ini membantu peneliti untuk mengkaji bagaimana kebijakan luar negeri berkontribusi terhadap transformasi dinamika kekuasaan, aliansi, dan pola interaksi internasional.

Dengan menganalisis *outcomes*, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memiliki implikasi yang kompleks terhadap hubungan antarnegara. Dimensi *outcomes* membuat pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan Amerika Serikat menciptakan ketegangan struktural dan politik di dalam NATO, yang pada gilirannya mencerminkan pergeseran mendasar dalam hubungan keamanan transatlantik antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya.

[22] Morin and Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX*.
[23] Morin and Paquin, *FOREIGN POLICY ANALYSIS A TOOLBOX*.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupkan serangkaian sistematika yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna memahami, menjelaskan, atau memprediksi fenomena yang diamati. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau solusi yang valid dan andal atas masalah penelitian yang akhirnya membentuk suatu Kesimpulan.[24]

1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pemilihan jenis kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam analisis kebijakan luar negeri, merujuk pada makna dan konteks di balik tindakan aktor[25]. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap data.

Pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus analitik yang bersifat eksplanatif. Strategi studi kasus dipilih untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap satu unit atau fenomena kontemporer secara utuh dalam konteks kehidupan nyata[26]. Studi kasus di sini bersifat analitik karena bertujuan untuk menguji dan menerapkan kerangka konseptual analisis kebijakan luar negeri terhadap kasus spesifik, sehingga dapat memberikan pemahaman teoretis yang

[24] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (n.d.), www.penerbitbukumurah.com.
[25] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014)
[26] Robert K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (n.d.).

lebih kaya. Sementara itu, sifat eksplanatif diterapkan untuk menyajikan gambaran yang rinci, sistematis, dan faktual mengenai bagaimana proses keputusan diambil berdasarkan proses yang panjang[27].

1.8.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada faktor faktor yang menyebabkan Amerika Serikat mendesak aliansi NATO. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang tahun 2017 hingga 2025. Batasan tersebut dipilih karena upaya AS yang terus mendesak untuk menaikkan komitmen tersebut dimulai pada masa presidensi Donald Trump yang pertama dan kedua, yaitu pada tahun 2017-2021 dan 2025 sampai sekarang. Meskipun begitu, dalam penelitian ini konteks historis sebelum periode ini akan dibahas juga untuk memberikan latar belakang dan juga data yang akan digunakan. Karena, hubungan antara AS dan Eropa adalah hubungan yang berlandaskan kepada Sejarah yang kuat, dan mustahil akan meneliti perubahan hubungannya tanpa mengaitkannya dengan ikatan sejarah yang panjang. Penelitian ini juga akan membatasi cakupan isu pada dimensi keamanan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada dimensi lain seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mungkin relevan.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Menurut Mas'oed, unit analisis atau variable dependen merupakan unit yang perilakunya akan dijelaskan dan dideskripsikan.[28] Pada penelitian ini, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat menjadi unit analisis yang akan dijelaskan.

---

[27] W. Lawrence. Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches* (Pearson, 2014).
[28] *381522834-Ilmu-Hubungan-Internasional-Mohtar-Mas-Oed-Pdf (1)*, n.d.

Kemudian unit eksplanasi atau variable independen adalah unit yang memengaruhi unit analisis yang akan diamati, yaitu komitmen investasi pertahanan NATO. Kemudian terdapat level analisis yaitu objek yang menjadi fokus utama yang akan dibahas didalam penelitian.[29] Dalam penelitian ini, level analisis adalah Negara. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat menjadi fokus utama dengan menyoroti kebijakannya terhadap aliansi NATO. Level analisis akan mengukur faktor faktor penting yang akan diaplikasikan didalam penelitian.[30]

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dengan memanfaatkan informasi yang yang tersedia di sosial media atau di halaman resmi entitas terkait, seperti situs resmi *US department of state official*, *US Department of War, Foreign Relations of United States, US Congress, White House,* Akun pribadi Presiden Donald Trump dan situs resmi NATO, Instagram NATO serta laporan tahunan NATO untuk mengutip pernyataan-pernyataan resmi secara langsung. peneliti juga akan mengumpulkan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, atau penelitian terdahulu, seperti Journal of Transatlantic Studies yang diterbitkan oleh Plagrave Macmillan dan *Research papers* dan *Policy Brief* yang diterbitkan oleh NATO Defence College, artikel berita oleh CNN, BBC dan media lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis dan disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

[29] Luerdi Luerdi, "TEORI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: MASALAH TINGKAT ANALISIS," preprint, May 1, 2023, https://doi.org/10.31219/osf.io/rtvdg.
[30] *381522834-Ilmu-Hubungan-Internasional-Mohtar-Mas-Oed-Pdf (1)*.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada yang dikembangkan oleh Creswell.[31] Model ini dipilih karena proses dilakukan secara linear dan interaktif, Dimana peneliti bergerak maju mundur antar tahap untuk memastikan keadalaman analisis. Tahapan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu :

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data

Pada tahap awal peneliti mengumpulkan dan mengorganisir seluruh data yang relevan dengan objek penelitiaan. Data yang disiapkan berupa naskah resmi dari pemerintahan AS, dokumen resmi dari Foreign Relations of United States, pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, data visual yang diterbitkan oleh NATO, temuan sekunder dari para ahli dan masih banyak jenis data lainnya

2. Membaca Data

Setelah data data tersebut dikumpulkan, peneliti akan membaca secara keseluruhan semua data tersebut untuk memberikan pemahaman dan Gambaran umum tentang hubungan kebijakan luar negeri AS dengan komitmen pendanaan NATO.

[31] Matthew B Miles, • A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition* (n.d.).

3. *Codin*g Data

Data yang telah dibaca kemudian dipotong-potong ke dalam segmen-segmen teks dan diberi label (kode). Dalam kasus penelitian ini, koding difokuskan pada istilah-istilah kunci seperti "Pressure", "Agenda Setting", "Article 5 Commitment", dan "Burden-sharing". Proses koding ini membantu peneliti untuk menyaring informasi yang sangat teknis menjadi kategori-kategori yang lebih sederhana.

4. Penafsiran Data

Data yang telah dikelompokkan berdasarkan kode kode tertentu, akan dicoba dihubungkan dengan temuan kerangka konseptual yaitu Foreign Policy Analysis. Seperti contohnya menghubungkan kode “pressure” dengan indikator the goals of foreign policy.

5. Penyajian dan interpretasi data

Setelah data dihubungkan dengan teori atau kerangka konseptual, selanjutnya akan disusun menjadi sebuah narasi atau paragraf eksplanasi untuk memberikan jawaban yang analitis terhadap pertanyaan penelitian.

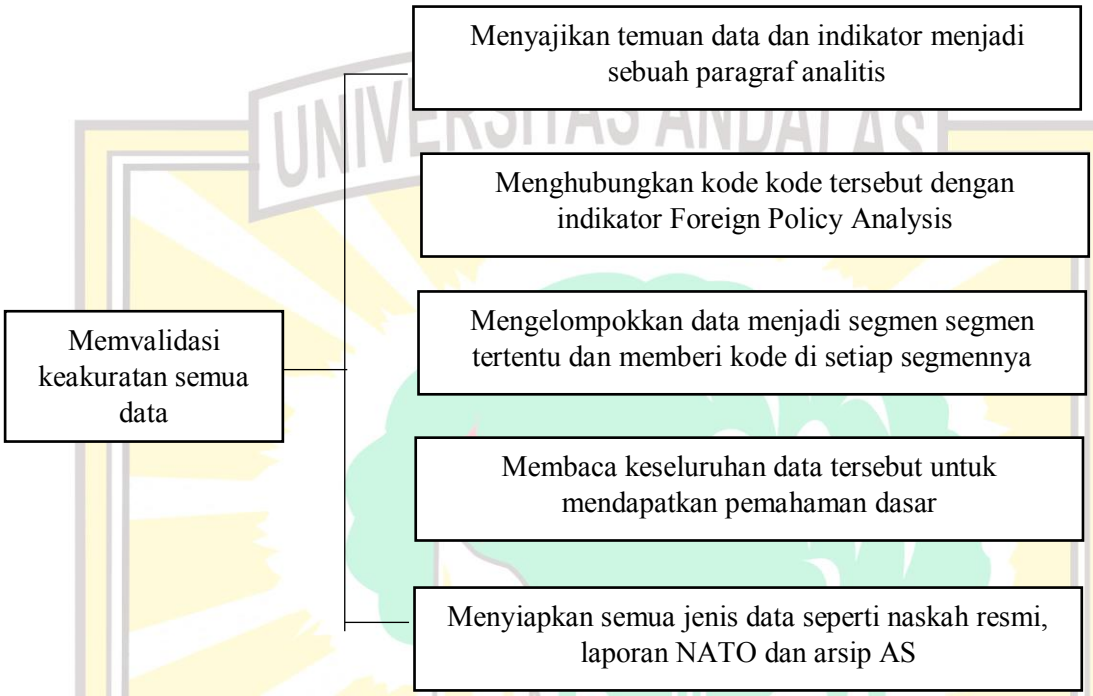

Gambar 1.1 Teknik Analisis Data

Sumber : Creswell (2018)

Teknik analisis data oleh Creswell akan memberikan analisis data yang komprehensif dengan mereduksi data yang kompleks menjadi penjelasan yang analitis.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II : EVOLUSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP NATO

Pada Bab ini akan membahas dimensi Sejarah bagaimana awalnya keterlibatan dan peran AS dalam pembentukan NATO, fokus kebijakan AS pada masa perang dingin dan setelah perang dingin berakhir. Dan terakhir bagaimana arah kebijakan luar negeri AS terhadap NATO dibawah presiden Donald Trump dijalankan.

BAB III : KOMITMEN INVESTASI PERTAHANAN NATO

Pada Bab ini akan membahas bagaimana sistem pendanaan internal di dalam NATO dan bagaimana dinamika nya dari masa ke masa.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENDESAK KENAIKAN INVESTASI PERTAHANAN NATO

Pada Bab ini akan mencoba mengidentifikasi data yang didapat terkait kebijakan AS tersebut menggunakan kerangka berpikir Morin dan Paquin dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri dan mengolah data berdasarkan Teknik analisis oleh Creswell. Hasil akhir dari analisis ini adalah menjawab pertanyaan penelitian mengapa pada akhirnya AS mendesak menaikkan komitmen investasi pertahanan NATO.

BAB V. PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik yang telah diteliti.